

**THE EFFECT OF GOOD GOVERNANCE AND HUMAN RESOURCE COMPETENCY OF VILLAGE  
FUND MANAGEMENT  
(EMPIRICAL STUDY OF VILLAGES IN TAMBANG DISTRICT, KAMPAR DISTRICT AND  
BANGKINANG DISTRICT)**

**Maulina Agustiningsih<sup>1</sup>, Taufeni Taufik<sup>2</sup>, Novita Indrawati<sup>3</sup>**  
<sup>1,2&3</sup>Universitas Riau

Email : [maulinaagustiningsih9@gmail.com](mailto:maulinaagustiningsih9@gmail.com)<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to study and obtain empirical evidence regarding the effect of the implementation of good governance and human resource competencies on village fund management in villages in Tambang, Kampar and Bangkinang Kota districts. The population in this study were 3 (three) districts namely Tambang, Kampar and Bangkinang Kota Districts with all villages totaling 34 villages. The sample used was all villages, namely 34 villages through a sampling method using saturated sample technique, with research subjects totaling 4 functions of village fund management apparatus. Data obtained through a questionnaire with the analysis method used is Partial Least Square (PLS) with WarpPLS 6.0. The results of hypothesis testing indicate that the application of good governance affects the management of village funds and there is also an influence of human resource competence on village fund management. Based on the results of the study it can be concluded that with the implementation of good governance and followed by the competence of appropriate human resources owned by village officials will be able to manage village funds better.*

**Keywords :** *Implementation of good governance, Human resource competence, Village fund management*

**PENGARUH GOOD GOVERNANCE DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP  
PENGELOLAAN DANA DESA  
(STUDI EMPIRIS PADA DESA DI KECAMATAN TAMBANG, KECAMATAN KAMPAR DAN  
KECAMATAN BANGKINANG KOTA)**

**ABSTRAK**

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penerapan *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tambang, Kampar dan Bangkinang Kota. Populasi dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Tambang, Kampar dan Bangkinang Kota dengan seluruh desa berjumlah yaitu 34 desa. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah seluruh desa, yaitu sebanyak 34 desa. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik sampel jenuh, dengan subjek penelitian berjumlah 4 fungsi aparatur pengelolaan dana desa. Data diperoleh melalui kuesioner dengan metode analisis yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS) dengan WarpPLS 6.0. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh pada pengelolaan dana desa dan juga terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya *good governance* dan diikuti dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang sesuai dimiliki aparatur desa akan mampu melakukan pengelolaan dana desa secara lebih baik lagi.

**Kata Kunci :** *Penerapan good governance, Kompetensi sumber daya manusia, Pengelolaan dana desa*

## PENDAHULUAN

Kegiatan pengelolaan dana desa menurut PEMENDAGRI No 20 Tahun 2018 merupakan keseluruhan dari tindakan yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan baik mengingat pemerintah telah bertekad untuk mengalokasikan anggaran dana desa pada setiap tahunnya akan mengalami peningkatan hingga mencapai total Rp 400 triliun selama 5 tahun ke depan sampai di tahun 2024 (Gatra, 2019). Tentu hal ini, membutuhkan pola pertanggung jawaban yang diperoleh dari akuntabilitas vertikal dan juga akuntabilitas horizontal yang akan dilakukan dalam pengelolaan dana desa (Taufik, 2009). Terkait anggaran dana desa diberikan oleh pemerintah dalam kewenangan pengelolaannya kepada masing-masing pemerintah desa melalui kepala desa yang dibantu dengan Pelaksana Teknis Keuangan Desa (PTKD).

Selama program dana desa yang telah diberlakukan dan dijalankan memunculkan permasalahan dan kasus yang terjadi, diantaranya: ditemukannya oleh Menteri DPDTT penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh desa Sawah Besar Kecamatan Kampar Timur Kab. Kampar dalam bentuk salah prioritas penggunaan dana desa untuk membangun gapura yang tidak sesuai dengan PERMENDES Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa ([www.Republika.co.id](http://www.Republika.co.id)). Adanya kasus markup anggaran dana desa yang dilakukan dalam pembangunan area parkir pada desa Tanjung Alai Kecamatan XII Koto Kampar ([www.Harianbrantas.co.id](http://www.Harianbrantas.co.id)).

Selanjutnya menurut hasil LHP BPK RI Perwakilan Prov Riau menemukan adanya bantuan belanja transfer keuangan desa yang belum dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 3.609.298.623 pada laporan keuangan Kab. Kampar tahun 2015. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) telah mencatat jumlah kepala desa yang terjerat korupsi di desa juga ikut naik, yaitu sebanyak 214 kepala desa tersangkut kasus korupsi yang menyebabkan total kerugian negara mencapai Rp107,7 miliar ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)).

Oleh sebab itu, untuk mampu mengurangi permasalahan dan kasus serta kerugian yang dialami negara tentu dibutuhkannya pengelolaan dana desa yang melakuakan penerapan pada tata kelola pemerintahan yang baik (Taufik, 2019). *Good governance* adalah tatakelola pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2009). Penerapan *good governance* perlu dilakukan dalam aktivitas pengelolaan dana desa oleh aparatur desa dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan adanya partisipasi masyarakat untuk mampu mewujudkan pertumbuhan pada sektor publik yang lebih memiliki sinergis.

Sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian untuk mengetahui terhadap pentingnya pengaruh *good governance* terhadap kinerja sektor publik, kinerja organisasi, serta pada kinerja pemerintah daerah telah dilakukan oleh Taufik dan Kamala (2013), adapun terhadap pentingnya akuntabilitas ditekankan pada *non government organization* sebagai organisasi nirlaba telah dilakukan penelitian oleh Said, J et al., 2018. Hal inilah membuat peneliti tertarik melakukan penelitian dalam penerapan *good governance* terhadap pengelolaan dana desa.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor kunci yang paling mendasar dalam melakukan pengelolaan dana desa (Suwanda, 2015). Menurut Hutapea (2008:8) mendefinisikan kompetensi sumber daya manusia sebagai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang menjadi karakteristik dari *performance* yang dimiliki oleh suatu individu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afiah dan Rahmatika (2014), namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ponamon (2014) dan Siwambudi, et al (2017) yang menghasilkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penelitian ini menggunakan Variabel dependen yaitu kinerja Pengelolaan dana desa dan variabel independent yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah Penerapan *good governance* dan Kompetensi sumber daya manusia. Dimana pengelolaan dana desa diduga kuat dipengaruhi oleh penerapan *good governance* untuk bisa melakukan kegiatan pengelolaan dana desa yang transparansi, akuntabilitas dan adanya keikut sertaan masyarakat berupa partisipasi masyarakat. Selanjutnya pengelolaan dana desa telah diberi kewenangan penuh oleh pemerintah kepada kepala desa yang harus diikuti dengan kompetensi yang sesuai dan mempuni sehingga pada setiap tahap kegiatan pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan baik dan sebagai mana mestinya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Teori Agensi*

*Agency theory* pada dasarnya juga terdapat pada organisasi sector publik. Menurut Abdul dan Abdullah (2005) menyatakan bahwa diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan. Adapun menurut Bergman dan Lane (1990) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Bergman dan Lane (1990) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik.

Miriam Budiardjo (1994) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Dalam konteks organisasi sektor publik, senada dengan Mardiasmo (2002), menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang

amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pendapat Mardiasmo tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah desa terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah desa sebagai *agent* yang memunculkan adanya *information asymmetry* terjadi.

Berdasar *agency theory* pengelolaan pemerintah desa harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah desa dalam informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah desa, yang artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan untuk melakukan kecurangan juga menjadi lebih kecil.

### **Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Suharsimi Arikunto (1993:31) mendefinisikan kata pengelolaan sangat erat hubungannya dengan manajemen, yang dapat berarti pula pengaturan atau pengurusan. Selanjutnya telah banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dikarenakan itulah pengertian yang populer saat ini. Dalam hal ini pengelolaan dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk rangkaian pekerjaan atau suatu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang dalam aktivitas melakukanserangkaian kerja untuk mampu mencapai pada tujuan tertentu.

Fattah (2004:1) berpendapat bahwa dalam melakukan proses manajemen tentu akan ada terlibat fungsi-fungsi pokok yang akan ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Dengan begitu dapat ditarik suatu pengertian mengenai manajemen yaitu merupakan suatu aktivitas yang dimulai dengan melakukan tindakan merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan satu organisasi dalam segala aspek yang ada agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai secara efektif dan juga efisien.

Adapun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 mendefinisikan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi kegiatan yang dilakukan dengan diawali pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

### **Penerapan Good Governance**

*Good Governance* merupakan bentuk dari tata kelola pemerintahan yang baik. Definisi *good governance* pada swasta atau perusahaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah menurut oleh Sukirno Agoes (2011:101) adalah sebagai suatu bentuk sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kerjanya.

Selanjutnya, definisi *good governance* pada pemerintah menurut Mardiasmo (2009) merupakan suatu konsep yang melakukan pendekatan melalui orientasi kepada pembangunan sektor publik dalam pemerintahan yang baik. Definisi lain mengenai *good governance* mengungkapkan bahwa diantaranya adalah menurut World Bank dalam Renyowijoyo (2010) mendefinisikan penekanan pada suatu bentuk cara pemerintah dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk dimanfaatkan pada kepentingan pembangunan masyarakat.

Oleh sebab itu, penerapan yang dilakukan dalam *good governance* memiliki peran yang besar dan manfaat yang dapat membawa perubahan positif untuk pemerintah baik pada level tertinggi yaitu pemerintah usat sampai pada level terendah yaitu pemerintah desa dan maupun masyarakat umum. Penerapan *good governance* dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip diantaranya adanya transparansi, terwujudnya akuntabilitas dan keikutsertaan masyarakat berupa partisipasi masyarakat didalam pengelolaan dana desa.

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Terkait definisi kompetensi sumber daya manusia didefinisikan oleh beberapa ahli diantaranya menurut Mc Ashan dalam Sudarmanto (2009: 48) kompetensi merupakan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki seseorang, yang menjadi bagian dari dirinya, sehingga dia bisa menjalankan penampilan kognisi, afeksi, dan perilaku psikomotorik tertentu. Selanjutnya pengertian dan arti kompetensi menurut Lyle Spencer & Signe Spencer dalam Moeheriono (2010: 3) adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu.

Adapun menurut Wibowo (2007:86) mengatakan kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi

Pengaruh *Good Governance* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar dan Kecamatan Bangkinang Kota) (Maulina Agustiningih, Taufeni Taufik, dan Novita Indrawati)

menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut. Hutapea (2008:8) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi, adalah sebagai berikut: (1) Pengetahuan (*Knowledge*), merupakan penguasaan ilmu dan teknologi yang dimiliki seseorang, dan diperoleh melalui proses pembelajaran serta pengalaman selama kehidupannya. Indikator pengetahuan (*knowledge*) dalam hal ini adalah, pengetahuan manajemen bisnis, pengetahuan produk atau jasa, pengetahuan tentang konsumen, promosi dan strategi pemasaran. (2) Keterampilan (*Skill*), adalah kapasitas khusus untuk memanipulasi suatu objek secara fisik. Indikator keterampilan meliputi keterampilan produksi, berkomunikasi, kerjasama dan organisasi, pengawasan, keuangan, administrasi dan akuntansi. (3) Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah seseorang pegawai di dalam peran melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perusahaan. apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilakukan sebaik-baiknya.

### Kerangka Pemikiran

#### Penerapan *Good Governance* terhadap Pengelolaan Dana desa

*Good governance* sebagai suatu proses dan struktur yang dapat digunakan dalam mengarahkan dan mengelola kegiatan pemerintah kearah peningkatan agar adanya pertumbuhan dan akuntabilitas yang mampu diwujudkan (Taufeni Taufik, 2017). Selanjutnya tujuan dari penerapan *good governance* menurut Kurniawan (2005:12) adalah sebagai bentuk mewujudkan penyelenggaraan dalam pemerintahan negara Republik Indonesia yang solid dan dapat bertanggungjawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan pada interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan juga masyarakat. Oleh sebab itu, dengan adanya penerapan *good governance* yang baik tentu pengelolaan keuangan desa terkait dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa akan baik pula sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai dalam peningkatan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata dan adil.

Penelitian dalam mengetahui terhadap pentingnya pengaruh *good governance* terhadap kinerja sektor publik, kinerja organisasi, serta pada kinerja pemerintah daerah telah dilakukan oleh Taufeni Taufik dan Dian Kamala, 2013 dan terhadap pentingnya akuntabilitas ditekankan pada *non government organization* sebagai organisasi nirlaba telah dilakukan penelitian oleh Said, J et al., 2018. Berdasarkan Kerangka Pemikiran diatas dan adanya penelitian terdahulu, maka hipotesis yang di ajukan adalah sebaagai berikut:

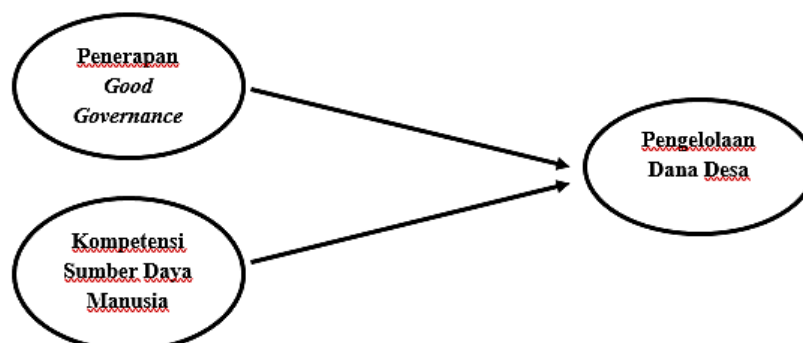
H1: Penerapan *good governance* berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

#### Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Dana Desa

Dalam mengelola sumber daya manusia berdasarkan kompetensinya dapat diyakini bisa lebih menjamin keberhasilan untuk mencapai tujuan dari organisasi, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriasih (2014). Dikarenakan sumber daya manusia tersebut akan lebih memahami dan mengerti serta mampu melakukan segala kegiatan secara baik sehingga tujuan bisa dicapai dengan baik (Siwambudi, 2017).

Hal ini juga sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah, maka tentu diperlukannya kompetensi sumber daya manusia yang mengelolanya secara baik. Penelitian dalam mengetahui terhadap pentingnya kompetensi sumber daya manusia telah diteliti oleh Nunuy Nur Afiah dan Dien Noviany Rahmatika (2014) yang menghasilkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap hasil kinerja, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ponamon (2014) dan Siwambudi (2017) yang menghasilkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Berdasarkan Kerangka Pemikiran diatas dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang di ajukan adalah sebagai berikut:

H2: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan variabel terikat (dependent) yaitu Pengelolaan dana desa dan variabel bebas (independent) yaitu Penerapan *Good Governance* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Jumlah sampel yang diambil dari seluruh jumlah populasi yaitu adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) desa yang ada pada 3 (tiga) kecamatan diantaranya Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar dan Kecamatan Bangkinang Kota. Adapun subjek dalam penelitian ini berjumlah 4 fungsi aparatur desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala seksi dengan memperoleh keseluruhan jumlah *responden* sebanyak 136 responden. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik sampel jenuh dikarenakan jumlah populasi yang sedikit.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, yang merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yaitu dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini dikumpulkan melalui metode angket, yaitu dengan melakukan penyebaran daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan analisis Partial Lets Square (PLS) dengan WarpPLS 6.0. Teknik ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel Penerapan *good governance* dan Kompetensi sumber daya manusia terhadap Pengelolaan dana desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan didalam kuesioner penelitian. Penyebaran kuesioner langsung dilakukan oleh penulis dan dalam penjemputan kuesioner juga langsung dijemput kembali oleh penulis ke masing-masing kantor desa yang ada pada 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan tambang, kecamatan kampar dan kecamatan bangkinang kota dengan jumlah 34 desa dan seluruh responden sebanyak 136 responden.

### Tingkat Pengembalian Kuesioner

Waktu penyebaran dan pengumpulan kuesioner terjadi selama  $\pm 3$  minggu yaitu dimulai pada tanggal 18 November 2019 sampai dengan 9 Desember 2019. Adapun subjek penelitian dilakukan pada aparatur desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa dengan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) sesuai menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, diantaranya kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala seksi.

Dari jumlah seluruh kuesioner yang disebarakan sebanyak 136 sampel yang diperoleh dari 3 (tiga) kecamatan dengan jumlah desa seluruhnya 34 desa memperoleh tingkat pengembalian sebanyak 100% atau seluruh kuesioner kembali. Adapun terkait jawaban dari responden tidak ditemukannya sampel kuesioner yang tidak valid hal ini mengakibatkan seluruh jumlah data yang diperoleh peneliti dari responden dapat digunakan.

### Demografi Responden

Dari seluruh jumlah responden dalam penelitian ini didominasi dengan jenis kelamin pria sebanyak 74 orang dan sisanya berjenis kelamin perempuan sebanyak 62 orang. Adapun tingkat pendidikan yang dimiliki responden didominasi tamatan strata 1 (S1) sebanyak 75 orang, diikuti dengan tamtan SLTA/ SMA sebanyak 50 orang dan 11 orang memiliki pendidikan tamatan diploma 3 (D3).

Rata-rata usia yang dimiliki oleh responden yang berjumlah 136 orang adalah berumur 36 tahun, dengan memiliki rata-rata masa lama bekerja pada kantor desa selama 10 tahun dan pada posisi jabatan yang diemban oleh responden di kantor desa rata-rata telah dilakukan selama 6 tahun.

### Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan agar dapat memberikan gambaran tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Deskripsi data yang akan disajikan meliputi nilai tertinggi, nilai terendah, mean, dan standar deviasi. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan data nilai tertinggi, nilai terendah, mean, dan standar deviasi.

**Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif (max, min, mean, dan SD)**

Descriptive Statistics					
Variabel Laten	N	Minimum	Maximum	Rata-rata (mean)	Standar Deviasi
Penerapan <i>Good Governance</i>	136	31.00	65.00	56.4853	6.32805
Kompetensi Sumber Daya Manusia	136	18.00	39.00	23.5588	4.39826

Pengaruh *Good Governance* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar dan Kecamatan Bangkinang Kota) (Maulina Agustiningih, Taufeni Taufik, dan Novita Indrawati)

Pengelolaan Dana Desa	136	42.00	105.00	89.4265	11.54164
Valid N (listwise)	136				

Sumber: Data Diolah, SPSS Versi 26 (2019)

Tabel diatas menjelaskan bahwa variabel penerapan *good governance* memperoleh hasil nilai rata-rata (56.48) lebih besar dari nilai standar deviasinya yaitu (6.32) yang berarti telah dilakukannya penerapan *good governance* didalam pengelolaan dana desa secara baik dan sesuai dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Adapun nilai maximum dan nilai minimum yang diperoleh variabel penerapan *good governance* memperlihatkan presepsi reponden yang memilih setuju (netral) sebanyak 31 dan sisanya memilih sangat setuju sebanyak 65.

Pada variabel kompetensi sumber daya manusia memperoleh hasil nilai rata-rata lebih besar (23.55) dari standar deviasinya yaitu (4.39) yang menjelaskan bahwa didalam pengelolaan dana desa membutuhkan kompetensi sumber daya manusia agar dapat mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel dan adanya partisipasi dari masyarakat. Adapun nilai maximum dan nilai minimum yang diperoleh variabel kompetensi sumber daya manusia menunjukkan bahwa presepsi responden yang memilih tidak setuju sebanyak 18 dan sisanya memilih setuju sebanyak 39.

Pengelolaan dana desa memperoleh hasil nilai rata-rata lebih besar yaitu 89.42 dari pada standar deviasi sebesar 11.54, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan sesuai dengan Pemandagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa yang dilakukan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban agar dana desa mampu dikelola secara baik, efektif dan efisien yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Adapun nilai maximum dan nilai minimum yang diperoleh variabel pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa presepsi responden yang memilih setuju (netral) sebanyak 42 dan sisanya memilih sangat setuju sebanyak 105.

### Analisis Statistik Inferensial

#### Hasil Uji Bias Metode Umum (*Common Method Bias*)

Hasil uji bias metode umum (*common method bias*) dengan melihat nilai full collinearity VIF setiap variabel yang ada dalam penelitian ini. Adapun hasil VIF dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Nilai Full Collinearity VIF Konstruk Dan Pengelolaan Dana Desa (PDD), Penerapan Good Governance (GG), Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM), Dan Komitmen Organisasi (KO)**

	PGG	KSDM	PDD
Full collinearity VIFs	1.473	2.094	2.020

Sumber: Data Primer Diolah, WarpPLS 6.0 (2019)

Pada tabel diatas dapat dilihat nilai *full collinearity* VIF pada seluruh variabel konstruk memiliki nilai *full collinearity* VIF < dari 3,3 yakni konstruk PGG (1,473), KSDM (2,094), dan PDD (2,020). Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa, seluruh variabel konstruk dalam penelitian ini bebas dari permasalahan kolinearitas atau *common method bias*.

#### Hasil Uji Validitas Convergent

Untuk pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *construct validity* yang terbagi menjadi dua yaitu konvergen dan diskriminan (Ghozali & Latan, 2014:91).

#### Hasil Uji Validitas Convergent

Validitas konvergen (*convergent*) bertujuan untuk menguji korelasi antar item/ indikator untuk mengukur konstruk. Idealnya indikator yang valid adalah indikator yang memiliki nilai loading factor di atas 0,70. Dalam beberapa kasus, sering syarat loading factor di atas 0,70 sering tidak terpenuhi khususnya untuk kuesioner yang baru dikembangkan. Oleh karena itu, loading antara 0,40-0,70 harus tetap dipertimbangkan untuk tetap dipertahankan, dapat dilihat dari table dibawah ini:

**Tabel 3. Nilai Indicator Loading, P-Value dan AVE Konstruk Penerapan Good Governance, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Dana Desa**

	Indicator Loading	P-Value	AVE	Hasil
PGG1	0.890	<0.001	0.561	Valid

PGG2	0.637	<0.001		Valid
PGG3	0.762	<0.001		Valid
PGG4	0.884	<0.001		Valid
PGG5	0.873	<0.001		Valid
PGG6	0.513	<0.001		Valid
PGG7	0.527	<0.001		Valid
PGG8	0.749	<0.001		Valid
PGG9	0.861	<0.001		Valid
PGG10	0.628	<0.001		Valid
PGG11	0.741	<0.001		Valid
PGG12	0.812	<0.001		Valid
PGG13	0.724	<0.001		Valid
KSDM1	0.694	<0.001		Valid
KSDM2	0.852	<0.001		Valid
KSDM3	0.859	<0.001		Valid
KSDM4	0.641	<0.001	0.624	Valid
KSDM5	0.747	<0.001		Valid
KSDM6	0.801	<0.001		Valid
KSDM7	0.886	<0.001		Valid
KSDM8	0.690	<0.001		Valid
PDD1	0.874	<0.001		Valid
PDD2	0.875	<0.001		Valid
PDD3	0.761	<0.001		Valid
PDD4	0.686	<0.001		Valid
PDD5	0.768	<0.001		Valid
PDD6	0.807	<0.001		Valid
PDD7	0.858	<0.001		Valid
PDD8	0.859	<0.001		Valid
PDD9	0.629	<0.001		Valid
PDD10	0.831	<0.001		Valid
PDD11	0.786	<0.001	0.630	Valid
PDD12	0.784	<0.001		Valid
PDD13	0.713	<0.001		Valid
PDD14	0.827	<0.001		Valid
PDD15	0.769	<0.001		Valid
PDD16	0.836	<0.001		Valid
PDD17	0.747	<0.001		Valid
PDD18	0.838	<0.001		Valid
PDD19	0.821	<0.001		Valid
PDD20	0.839	<0.001		Valid
PDD21	0.700	<0.001		Valid

Sumber: Data Primer Diolah, WarpPLS 6.0 (2019)

Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai *indicator loading* atau *loading factor* konstruk dari seluruh variabel ada beberapa indikatornya yang memperoleh nilai *indicator loading* variabel < 0,70. Namun peneliti tetap mempertahankan *indicator loading* yang memperoleh nilai < 0,70 tersebut di dalam penelitian ini, karena menurut Hair dkk (2013) dalam Sholihin dan Ratmono (2013:66) *loading* antara 0,40-0,70 harus tetap dipertimbangkan untuk dipertahankan. Seluruh indikator memiliki signifikansi p-value dibawah 0,05 dan nilai *average variance extracted* (AVE) di atas 0,50 yang dapat diartikan bahwa seluruh indikator relatif dari masing-masing variabel yaitu variabel penerapan *good governance* (PGG), kompetensi sumber daya manusia (KSDM) dan pengelolaan dana desa (PDD) di atas memiliki korelasi terhadap konstruk penerapan *good governance*, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan dana desa. Hal ini menjelaskan bahwa seluruh indikator yang ada pada konstruk penerapan *good governance* (PGG), kompetensi sumber daya manusia (KSDM) dan pengelolaan dana desa (PDD) telah memenuhi persyaratan *validitas convergent*.

### Hasil Uji Validitas Discriminant

Validitas diskriminan (*discriminant*) bertujuan untuk menguji item/ indikator dari dua konstruk yang seharusnya tidak berkorelasi tinggi (Ghozali & Latan, 2014:91). Oleh sebab itu, nilai *cross loading* dan nilai Akar Kuadrat (*Square Roots*) *Average Variance Extracted* (AVE) dapat dilihat dari table dibawah ini:

Pengaruh *Good Governance* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar dan Kecamatan Bangkinang Kota) (Maulina Agustiningasih, Taufeni Taufik, dan Novita Indrawati)

**Tabel 4. Nilai Cross Loading Konstruk Penerapan Good Governance (PGG), Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) dan Pengelolaan Dana Desa (PDD)**

	PGG	KSDM	PDD
PGG1	0.792	-0.453	0.409
PGG2	0.774	-0.460	0.435
PGG3	0.822	-0.369	0.434
PGG4	0.791	-0.457	0.406
PGG5	0.786	-0.465	0.406
PGG6	0.723	-0.445	0.529
PGG7	0.833	-0.462	0.304
PGG8	0.850	-0.397	0.348
PGG9	0.794	-0.457	0.401
PGG10	0.786	-0.454	0.420
PGG11	0.833	-0.353	0.426
PGG12	0.809	-0.425	0.406
PGG13	0.850	-0.348	0.396
KSDM1	-0.372	0.736	-0.565
KSDM2	-0.280	0.809	-0.518
KSDM3	-0.407	0.739	-0.537
KSDM4	-0.389	0.733	-0.558
KSDM5	-0.530	0.725	-0.441
KSDM6	-0.456	0.782	-0.424
KSDM7	-0.464	0.750	-0.472
KSDM8	-0.385	0.735	-0.558
PDD1	-0.324	0.785	-0.528
PDD2	0.390	-0.508	0.768
PDD3	0.370	-0.540	0.756
PDD4	0.454	-0.565	0.689
PDD5	0.340	-0.482	0.808
PDD6	0.397	-0.503	0.768
PDD7	0.348	-0.554	0.756
PDD8	0.392	-0.507	0.768
PDD9	0.366	-0.527	0.767
PDD10	0.425	-0.583	0.693
PDD11	0.394	-0.488	0.779
PDD12	0.392	-0.490	0.778
PDD13	0.337	-0.546	0.767
PDD14	0.336	-0.510	0.792
PDD15	0.359	-0.534	0.765
PDD16	0.446	-0.559	0.699
PDD17	0.387	-0.489	0.782
PDD18	0.375	-0.509	0.775
PDD19	0.358	-0.540	0.762
PDD20	0.391	-0.468	0.793
PDD21	0.378	-0.543	0.749

Sumber: Data Primer Diolah, WarpPLS 6.0 (2019)

Pada tabel 4 di atas, dapat terlihat bahwa nilai korelasi seluruh indikator dari masing-masing variabel konstruk yaitu penerapan *good governance* (PGG), kompetensi sumber daya manusia (KSDM) dan pengelolaan dana desa (PDD) mempunyai korelasi yang tinggi dibandingkan pada variabel konstruk lainnya. Hal ini dibuktikan variabel konstruk penerapan *good governance* (PGG) dibandingkan dengan variabel konstruk lain, seperti pengelolaan dana desa (PDD), kompetensi sumber daya manusia (KSDM) memperoleh hasil lebih tinggi. Selanjutnya, pada variabel konstruk kompetensi sumber daya manusia (KSDM) memperoleh hasil nilai lebih tinggi dibandingkan variabel penerapan *good governance* (PGG) dan pengelolaan dana desa (PDD). Serta pada variabel konstruk pengelolaan dana desa (PDD) memperoleh hasil lebih besar dibandingkan variabel penerapan *good governance* (PGG) dan kompetensi sumber daya manusia (KSDM). Hal ini menjelaskan bahwa seluruh indikator yang ada pada variabel konstruk penerapan *good governance* (PGG), kompetensi sumber daya manusia (KSDM) dan pengelolaan dana desa (PDD) memenuhi persyaratan *validitas discriminant*.



**Tabel 5. Nilai Akar Kuadrat AVE Variabel Konstruk Penerapan *Good Governance* (GG), Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM), dan Pengelolaan Dana Desa (PDD)**

	PGG	KSDM	PDD
PGG	0.749		
KSDM	-0.533	0.790	
PDD	0.508	-0.691	0.794

Sumber: Data Primer Diolah, WarpPLS 6.0 (2019)

Pada tabel 5 dapat dilihat nilai-nilai yang diperoleh diatas dikatakan baik dan memenuhi syarat dari *validitas discriminant*. Hal ini terbukti dari hasil masing-masing dari variabel konstruk seperti penerapan good governance (PGG), kompetensi sumber daya manusia (KSDM), dan pengelolaan dana desa (PDD) dapat menjelaskan varian yang lebih banyak di dalam pengukuran item/ indikatornya sendiri dibandingkan dengan membaginya dengan variabel konstruk yang lain.

### Hasil Uji Reabilitas

Reliabilitas dari suatu pengukuran mengindikasikan stabilitas dan konsistensi dari instrumen yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk menguji suatu “kebaikan” dari pengukuran tersebut (Sekaran, 2003:203 dalam Ghazali & Latan, 2014:97). Uji ini dapat dilihat melalui kriteria sebagai berikut:

### Hasil Indicator Reliability

**Tabel 6. Nilai Cronbach's Alpha Variabel Konstruk Penerapan *Good Governance* (PGG), Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) dan Pengelolaan Dana Desa (PDD)**

	PGG	KSDM	PDD
Cronbach's Alpha	0.931	0.922	0.970

Sumber: Data Primer Diolah, WarpPLS 6.0 (2019)

Pada tabel di atas, dapat dilihat seluruh nilai dari *cronbach's alpha* variabel konstruk laten memperoleh hasil diatas 0,70. Hal ini menjelaskan bahwa seluruh variabel konstruk memenuhi persyaratan *reliabilitas*.

### Hasil Internal Consistency Reliability

**Tabel 7. Nilai Composite Reliability Variabel Alpha Konstruk Penerapan *Good Governance* (PGG), Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) dan Pengelolaan Dana Desa (PDD)**

	PGG	KSDM	PDD
Composite Reliab.	0.942	0.936	0.973

Sumber: Data Primer Diolah, WarpPLS 6.0 (2019)

Pada tabel 7 di atas, dapat dilihat seluruh nilai dari *composite reliability* variabel konstruk laten memperoleh hasil diatas 0,70. Hal ini menjelaskan bahwa seluruh variabel konstruk juga dapat memenuhi persyaratan *reliabilitas*.

### Hasil Evaluasi Model Struktural

Model struktural (inner model) merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten (Latan & Ghazali, 2012:77). Evaluasi model structural dapat diukur dengan kriteria sebagai berikut:

### Hasil Koefisien Determinasi

**Tabel 8. Nilai R-squared dan Adjusted R<sup>2</sup>**

	PGG	KSDM	PDD
R-squared			0.592

Sumber: Data Primer Diolah, WarpPLS 6.0 (2019)

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa diperoleh nilai *R-squared* pengelolaan dana desa (PDD) sebesar 0,592 yang memiliki arti bahwa pengaruh penerapan *good governance* (PGG), terhadap pengelolaan dana desa (PDD) adalah sebesar 59,2% dan sisanya 40,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Pengaruh *Good Governance* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar dan Kecamatan Bangkinang Kota) (Maulina Agustiniingsih, Taufeni Taufik, dan Novita Indrawati)

## Hasil Model Fit dan Quality Indexes

**Tabel 9. Nilai Indikator-Indikator Fit dan Quality Indexes**

Model Fit And Quality Indices
Average path coefficient (APC)=0.436, P<0.001
Average R-squared (ARS)=0.598, P<0.001
Average adjusted R-squared (AARS)=0.592, P<0.001
Average block VIF (AVIF)=1.292, acceptable if $\leq 5$ , ideally $\leq 3.3$
Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.862, acceptable if $\leq 5$ , ideally $\leq 3.3$
Tenenhaus GoF (GoF)=0.601, small $\geq 0.1$ , medium $\geq 0.25$ , large $\geq 0.36$
Sympson's paradox ratio (SPR)=1.000, acceptable if $\geq 0.7$ , ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, acceptable if $\geq 0.9$ , ideally = 1
Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if $\geq 0.7$
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, acceptable if $\geq 0.7$

Sumber: Data Primer Diolah, WarpPLS 6.0 (2019)

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai *average path coefficient* (APC) sebesar 0,436 dengan p-value = 0,001, *average R-squared* (ARS) sebesar 0,598 dengan p-value = 0,001, *average adjusted R-squared* (AARS) sebesar 0,592 dengan p-value = 0,001, hal ini dapat diartikan bahwa model penelitian mempunyai fit yang baik. selanjutnya, pada nilai *average variance inflation factor* (AVIF) sebesar 1,292 dan *average full collinearity variance inflation factor* (AFVIF) sebesar 1,862 <3,3, ini dapat diartikan bahwa tidak ada masalah *multikolonieritas* antar indikator dan antar variabel eksogen. Dan pada nilai *tenenhaus goodness of fit* (GOF) sebesar 0,601 > 0,36, hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekuatan prediksi model adalah besar atau fit model sangat baik.

### Pembahasan Dan Hasil Pengujian Hipotesis

Untuk memprediksi adanya hubungan kausalitas dalam SEM-PLS dengan menggunakan WarpPLS 6.0 dapat dilakukan dengan melihat T-Statistik yang dilihat pada tabel *path coefficient*, *p-value*, *standard errors* dan *effect sizes for path coefficients*.

**Tabel 10. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama**

	P- value	Effect Size	Path Coefficient	Standard Error
PGG → PDD	< 0.001	0.133	0.245	0.081

Sumber: Data Primer Diolah, WarpPLS 6.0 (2019)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil pengujian hipotesis terkait variabel penerapan *good governance* terhadap pengelolaan dana desa menyimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima karena nilai pada uji statistik P value diperoleh signifikan sebesar < 0.001 (dibawah  $\alpha:0,05$ ), dengan *effect size* sebesar 0,133 > 0,15.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dengan nilai variabel *path coefficient* sebesar 0,245 (berhubungan positif). Hal ini berarti bahwa dengan diterapkannya *good governance* yang mampu mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mewujudkan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

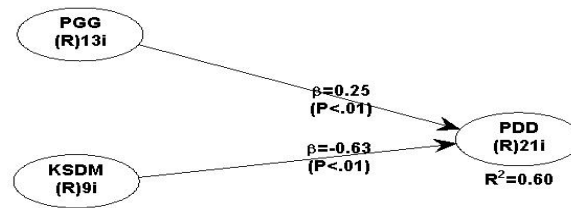
**Tabel 11. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua**

	P- value	Effect Size	Path Coefficient	Standard Error
KSDM → PDD	<0.001	0.465	0.626	0.074

Sumber: Data Primer Diolah, WarpPLS 6.0 (2019)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil pengujian hipotesis terkait variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana desa menyimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima karena nilai pada uji statistik P value diperoleh signifikan sebesar < 0,001 (dibawah  $\alpha:0,05$ ), dengan *effect size* sebesar 0,465 > 0,15.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dengan nilai variabel *path coefficient* sebesar 0,626 (berhubungan positif). Hal ini berarti bahwa dengan adanya kompetensi sumber daya yang dimiliki oleh aparatur desa, tentu akan mampu dengan mudah melakukan pengelolaan dana desa dengan baik.



Sumber: Data Primer Diolah, WarpPLS 6.0 (2019)

Gambar 2. Model Persamaan Struktural Dengan Path Coefficients, P-Values dan Effect Size

## PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini, diantaranya:

Penerapan *good governance* yang dilakukan secara baik dan benar pada seluruh aktivitas pengelolaan dana desa yang diawali tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu dengan terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan adanya keikutsertaan masyarakat akan mampu mewujudkan pengelolaan dana desa yang bebas dari penyalahgunaan dan penyelewengan anggaran, maka dengan begitu dapat mewujudkan anggaran dana desa yang sesuai dengan peruntukannya. Oleh sebab itu, dalam hal ini pemerintah desa yang ada di Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar dan Kecamatan Bangkinang Kota hendaknya lebih memahami didalam penerapan *good governance* yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa dengan cara mengerti dan faham dari maksud serta tujuan dilakukannya penerapan *good governance* itu sendiri yang mampu menciptakan transparansi, akuntabilitas dan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Selanjutnya kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor penting didalam pengelolaan dana desa. Dengan memiliki kompetensi sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, maka dapat memudahkan pengelolaan dana desa. Dimana pada setiap tahapan dalam proses pengelolaan dana desa memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan ahli dibidangnya, agar pengelolaan dana desa dapat direncanakan sesuai dengan semestinya, dilaksanakan secara baik dan benar sesuai peraturan yang ada, lengkapnya penatausahaan dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan serta adanya laporan yang lengkap pada setiap tahap pengelolaan dana desa sehingga mampu dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, maka pemerintah desa yang ada pada Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar dan Kecamatan Bangkinang Kota diharapkan untuk dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara rutin dengan mengadakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan diklat-diklat yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Hal ini juga membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel lain yang diduga berpengaruh pada pengelolaan dana desa.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. Faisal. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Edisi Kedua, Cetak Kelima. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah.
- Gatra, Sandro. (26 Februari 2019). *Total Dana Desa Tahun 2019-2024 Sebesar Rp 400 Triliun*. <https://nasional.kompas.com>. Diakses 28 September 2019.
- Bergman, Michael and Jan-Erik Lane. 1990. *Public Policy In A Principal-Agent Framework*. Journal of Theoretical Politics 2(3): 339-352.
- CNNIndonesia.com. 2019. *Icw Sebut Korupsi Dana Desa Kian Meningkat*. <https://www.cnnindonesia.com>. Diakses 20 Desember 2019.
- Fattah Nanang. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs) Dan Dewan Sekolah*. Pustaka Bani Quraisy. Bandung.
- Ghozali, Imam., & Hengky Latan. 2014. *Partial Least Squares: Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Warppls 3.0 Edisi Kedua*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Harianbrantas. com. 2019. <http://www.harianberantas.co.id/2019/07/dugaan-korupsi-add-kades-tanjung-alai.html>
- Indriasih, Dewi. 2014. *The Effect Of Government Apparatus Competence And The Effectiveness Of Government Internal Control Toward The Quality Of Financial Reporting In Local Government*. ISSN Vol.5, No.20.
- Kurniawan, Agung.2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta.
- Moehariono. 2010. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Moe, T. M. 1984. *The New Economics Of Organization*. American Journal of Political Science 28(5): 739-777.
- Nunuy Nur Afiah dan Dien Noviany Rahmatika. 2014. *Factors Influencing The Quality Of Financial Reporting And Its Implication On Good Governance (Research On Local Government Indonesia)*. Research International Journal of Business, Economic and Law.

Pengaruh *Good Governance* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar dan Kecamatan Bangkinang Kota) (Maulina Agustiningih, Taufeni Taufik, dan Novita Indrawati)

- Parulian Hutapea dan Nurianna Thoha. 2008. *Kompetensi Plus*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dalam mengatur tentang pengelolaan dana desa.
- Ponamon, I.F. 2014. *Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Skpd Pemerintah Kota Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Universitas Sam Ratulangi, 9 (2): 68-80.
- Renyowijoyo, Muindro. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba Edisi Kedua*. Penerbit Mitra Wacana Media. Yogyakarta.
- Said, J., Alam, M.M., & Johari, R.J. 2018. *Assessment Of Accountability Practices In The Public Sector Of Malaysia*. Asia-Pacific Management Accounting Journal, 13(1), 167-184.
- Siwambudi I G Ngurah, Gerianta Wirawan Yasa, dan I Dewa Nyoman Badera. 2017. *Komitment Organisasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 6.1 (2017): 385-416.
- Sholihin Mahfud dan Ratmono, Dwi. 2013. *Analisis Sem-Pls Dengan Wrappls 3.0 Untuk Hubungan Nonlinear Dalam Penelitian Sosial Dan Bisnis*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi Sdm*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharsimi Arikunto. 1993:31 Anggraeni Yunita Dan Chirstianingrum. 2018. *Measurement Of Accountability Management Of Village Funds*. Integrited Journal Of Business and Economics e-ISSN: 2549-3280.
- Sukrisno Agoes. 2011. *Etika Bisnis Dan Profesi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suwanda, D. 2015. *Factors Affecting Quality Of Local Government Financial Statements To Get Unqualified Opinion (Wtp) Of Audit Board Of The Republic Of Indonesia (Bpk)*. Research Journal of Finance and Accounting, 6 (4):139-157.
- Taufeni Taufik. 2009. *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia*. Pekbis Jurnal, Vol.17, No.01.
- Taufik Taufeni dan Dian Kamala. 2013. *Pengaruh Pemahaman Prinsip-Prinsip Good Governance, Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Sektor Publik*. Pekbis Jurnal Vol.5, No.1.
- Taufeni Taufik. 2019. *The Effect Of Internal Control System Implementation In Realizing Good Governance And Its Impact On Fraud Prevention*. International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 8, Issue 09.
- Wibowo. 2010. *Manajemen Kinerja*. Rajawali Press. Jakarta.